



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTOYO
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 635325

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	2.895.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 84 m ² /56 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 279 m ² /120 m ² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 670.000.000		
3.	Tanah Seluas 899 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 900.000.000		
4.	Tanah Seluas 380 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 80.000.000		
5.	Tanah Seluas 1.041 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 230.000.000		
6.	Tanah Seluas 559 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 120.000.000		
7.	Tanah Seluas 1.149 m ² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
8.	Tanah dan Bangunan Seluas 85 m ² /85 m ² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	181.650.000
1.	MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		



2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000	
3. LAINNYA, POLYGON SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 650.000	
4. MOTOR, YAMAHA ALL NEW AEROX C Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000	
5. MOBIL, HONDA JAZZ GEB 1,5 E MT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 73.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 339.121.720
F. HARTA LAINNYA	Rp. ----
Sub Total	Rp. 3.489.171.720
III. HUTANG	Rp. 142.690.315
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 3.346.481.405

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.